Jurnal **Edukasi Al-Amanah**

Vol. II No. 02 Hal. 124-137 ISSN: 3124-0542 (media online)

Research Article

Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kabupaten Bantaeng

[1]Risnawati

Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

[2]Nurfitriani

Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

[3]Syaripuddin

Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email Corresponding author: risnainha79@gmail.com

ABSTRAK

Pengangguran terbuka dan kemiskinan masih menjadi persoalan pembangunan yang dihadapi banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, karena keduanya berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat namun belum banyak dipahami melalui kerangka nilai Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena, dinamika, serta perspektif Ekonomi Islam terhadap pengangguran terbuka dan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng, sekaligus merumuskan implikasi konseptualnya bagi upaya penanggulangan kedua persoalan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi dokumentasi, memanfaatkan data sekunder dari publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng periode 2021–2024, dokumen pembangunan daerah, serta literatur Ekonomi Islam. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bantaeng menurun dari 4,07 persen (2021) menjadi 2,57 persen (2024), sementara tingkat kemiskinan turun dari 9,46 persen menjadi 8,26 persen pada periode yang sama, namun penurunan pengangguran tidak diikuti penurunan kemiskinan secara proporsional karena dominasi sektor informal berproduktivitas rendah. Dalam perspektif Ekonomi Islam, kedua fenomena tersebut dipahami sebagai persoalan keadilan distribusi dan belum optimalnya pemberdayaan ekonomi umat, sehingga penanggulangannya memerlukan penguatan instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif untuk mencapai kesejahteraan (falah) yang bersifat material sekaligus spiritual.

KATA KUNCI: pengangguran terbuka, kemiskinan, ekonomi Islam, kesejahteraan (falah), pemberdayaan ekonomi

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan, sehingga keberhasilannya tidak dapat diukur semata dari peningkatan produk domestik, tetapi juga dari kemampuan suatu wilayah mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Salah satu tantangan pembangunan yang masih dihadapi banyak daerah di Indonesia adalah keterkaitan antara pengangguran terbuka dan kemiskinan, dua indikator yang secara teoretis saling memengaruhi karena ketiadaan pekerjaan menghilangkan sumber pendapatan rumah tangga dan meningkatkan risiko jatuh miskin.[1]

Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi dinamika tersebut. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng mencatat tingkat pengangguran terbuka menurun dari 4,07 persen pada 2021 menjadi 2,57 persen pada 2024, sementara tingkat kemiskinan menurun dari 9,46 persen menjadi 8,26 persen pada periode yang sama.[2] Meskipun kedua indikator sama-sama menunjukkan tren perbaikan, penurunan pengangguran tidak selalu diikuti penurunan kemiskinan secara proporsional, yang mengindikasikan bahwa hubungan keduanya bersifat multidimensional dan tidak sepenuhnya linear.

Kajian empiris tentang hubungan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia telah banyak dilakukan melalui pendekatan kuantitatif berbasis data runtun waktu, misalnya di Sumatera Barat,[3] Jawa Barat,[4] Kabupaten Pelalawan,[5] maupun secara nasional.[6] Studi-studi tersebut

---

[1] S. Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, Edisi Revisi (Rajawali Pers, 2016).

[2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, *Agustus 2024: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bantaeng Sebesar 2,57 Persen* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, 2024). Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, *Profil Kemiskinan Kabupaten Bantaeng Maret 2024* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, 2024).

[3] R. M. Puteri dan M. Marwan, "Pengaruh Pengangguran, Pengeluaran per Kapita, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat," *Arzusin* 3, no. 3 (2023): 321–340.

[4] A. Rahim, W. Haryadi, dan D. Muliawansyah, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016–2020," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 1 (2024): 15–24.

[5] R. S. Sagala, Harlen, dan B. C. Utami, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pelalawan," *Jurnal Niara* 15, no. 3 (2022): 434–443.

[6] E. M. Putri dan D. Z. Putri, "Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Indonesia," *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan* 10, no. 2 (2021): 106–114. A. H. Maulana dan A. Faqih, "Analisis Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia," *Transformasi: Journal of Economics and Business Management* 1, no. 4 (2022): 118–125. D. D. Utami dan D. W. Udjianto, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,

secara konsisten menemukan bahwa pengangguran berkontribusi terhadap kemiskinan, tetapi umumnya berhenti pada analisis pengaruh statistik tanpa menempatkan temuan tersebut dalam kerangka nilai dan etika ekonomi yang lebih luas.

Di sisi lain, kajian Ekonomi Islam terhadap ketenagakerjaan dan kemiskinan cenderung berfokus pada instrumen tertentu secara terpisah, seperti efektivitas zakat produktif,[7] wakaf produktif,[8] atau etos kerja dalam Islam,[9] tanpa banyak menghubungkannya secara utuh dengan dinamika pengangguran terbuka dan kemiskinan pada level kabupaten. Penelitian Ismail[10] di Kota Bima memang telah mengaitkan pengangguran dengan perspektif Ekonomi Islam, tetapi berfokus pada peran pengusaha, bukan pada analisis dokumenter menyeluruh atas dinamika kedua fenomena tersebut.

Kekosongan kajian inilah yang menjadi celah (research gap) yang diisi oleh artikel ini. Kebaruan (novelty) penelitian terletak pada penempatan data resmi pengangguran terbuka dan kemiskinan Kabupaten Bantaeng ke dalam kerangka analisis Ekonomi Islam yang menekankan keadilan distribusi, pemberdayaan ekonomi, dan konsep falah sebagai tujuan akhir kesejahteraan,[11] bukan sekadar melihat pengangguran dan kemiskinan sebagai variabel statistik yang berdiri sendiri.

Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan," *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 2, no. 7 (2023): 637–646.

[7] I. Zuchroh, "Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3067–3073. R. S. D. Lestari dan M. A. Alwi, "Zakat Produktif sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan untuk Masyarakat Usia Produktif," *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2022): 37–50. I. Andriyanto, A. Aziz, M. I. Fasa, dan S. Suharto, "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 1 (2022): 151–158.

[8] J. Z. Hafizd, T. Saumantri, dan M. Mustopa, "Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia," *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (2022): 85–98. K. Rasyidi, Misbahuddin, dan S. Ridwan, "Pemberdayaan Wakaf Produktif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Maros," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2024): 23–40. R. W. Abiba dan E. Suprayitno, "Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs melalui Pemberdayaan Peternakan," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 109–122.

[9] P. Rahyu dan M. Z. Ulhaq, "Etos Kerja dalam Pandangan Agama dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan Ekonomi Islam," *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 6, no. 2 (2023): 79–88. Syarifullah, Hannani, dan S. Nurhayati, "Konsep Etos Kerja Perspektif Ekonomi Islam," *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 9–18.

[10] I. Ismail, "Analisis Peran Pengusaha dalam Mengurangi Pengangguran Terbuka Perspektif Ekonomi Islam di Kota Bima (Studi Kasus HIPMI dan TDA Kota Bima)," *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2021): 11–26.

[11] E. Sonita, "Eksplorasi Konsep Falah Perspektif Umer Chapra," *MAMEN: Jurnal Manajemen* 1, no. 1 (2022): 69–78. A. W. Zein, D. Anggraini, H. I. Y. Harahap, dan T. W. Sabrina, "Falah sebagai Tujuan Akhir

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana fenomena dan dinamika pengangguran terbuka serta kemiskinan di Kabupaten Bantaeng, bagaimana kedua fenomena tersebut dipahami dalam perspektif Ekonomi Islam, dan apa implikasi konseptual perspektif tersebut terhadap upaya penanggulangannya. Tujuan penelitian adalah menganalisis fenomena dan dinamika pengangguran terbuka dan kemiskinan berdasarkan data dan dokumen resmi, menganalisisnya melalui perspektif Ekonomi Islam, serta merumuskan implikasi konseptual bagi kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan. Artikel ini diharapkan memperkaya diskursus Ekonomi Syariah mengenai pembangunan daerah, sekaligus memberi masukan konseptual bagi pemerintah daerah dan lembaga pengelola zakat serta wakaf dalam merancang kebijakan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi dokumentasi (document study), karena fenomena pengangguran terbuka dan kemiskinan dipahami sebagai persoalan sosial ekonomi yang kompleks dan tidak cukup dijelaskan melalui angka statistik semata.[12] Data yang digunakan adalah data sekunder berupa publikasi resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng periode 2021–2024, dokumen pembangunan daerah, serta literatur Ekonomi Islam dan ayat Al-Qur'an yang relevan.[13]

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, penelusuran, dan pencatatan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña[14] yang terdiri atas kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, yang berlangsung secara simultan sejak awal pengumpulan data hingga penyusunan kesimpulan akhir. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data statistik BPS dengan dokumen pembangunan daerah dan literatur

dalam Ekonomi Islam: Perspektif Kesejahteraan Dunia dan Akhirat," *JIS: Journal Islamic Studies* 2, no. 3 (2024): 132–142.

[12] J. W. Creswell dan J. D. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (SAGE Publications, 2018). Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2022). M. N. Adlini, A. H. Dinda, S. Yulinda, O. Chotimah, dan S. J. Merliyana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–980.

[13] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

[14] M. B. Miles, A. M. Huberman, dan J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (SAGE Publications, 2014).

Ekonomi Islam, serta ketekunan penelaahan dokumen secara berulang untuk memastikan konsistensi interpretasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dan Karakteristik Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan dan menjadi indikator utama kemampuan perekonomian daerah menyerap tenaga kerja usia produktif.[15] Semakin tinggi TPT, semakin besar bagian angkatan kerja yang belum terserap dalam aktivitas ekonomi produktif.

Tabel 1. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bantaeng Tahun 2021–2024

Tahun	TPT (%)
2021	4,07
2022	2,72
2023	3,71
2024	2,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng (2024a).

Data pada Tabel 1 memperlihatkan pola yang berfluktuasi namun cenderung menurun dalam jangka menengah. TPT tercatat 4,07 persen pada 2021, turun menjadi 2,72 persen pada 2022, kembali naik menjadi 3,71 persen pada 2023, lalu turun kembali menjadi 2,57 persen pada 2024, atau menurun 1,50 poin persentase dibandingkan tahun 2021.[16] Pada 2024, jumlah angkatan kerja Kabupaten Bantaeng mencapai 124,99 ribu orang dengan penduduk bekerja sebanyak 121,78 ribu orang, sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 49,83 persen dari total penduduk bekerja.[17]

Berdasarkan karakteristik usia, pengangguran terbuka di Kabupaten Bantaeng didominasi oleh kelompok usia produktif yang baru memasuki pasar kerja, dengan penduduk usia kerja mencapai 159.440 jiwa dan jumlah pengangguran terbuka sebesar 3.207 jiwa pada 2024.[18] Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk bekerja masih didominasi lulusan Sekolah Dasar

[15] BPS Kabupaten Bantaeng, "Agustus 2024: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)...," 2024.
[16] BPS Kabupaten Bantaeng, "Agustus 2024: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)...," 2024.
[17] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, *Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng 2024* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, 2025).
[18] BPS Kabupaten Bantaeng, "Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng 2024," 2025.

atau sederajat sebanyak 62.559 jiwa, yang mengindikasikan ketidaksesuaian (mismatch) antara kualifikasi pendidikan dan kebutuhan pasar kerja modern. Berdasarkan sektor pekerjaan, dominasi sektor pertanian yang bersifat musiman dan berproduktivitas relatif rendah membuat penciptaan lapangan kerja di luar sektor primer berjalan lambat.

Temuan ini sejalan dengan teori pengangguran Sukirno[19] yang menjelaskan bahwa pengangguran terjadi ketika penawaran tenaga kerja melampaui kemampuan sektor ekonomi menciptakan kesempatan kerja, serta teori Keynes[20] yang mengaitkan keterbatasan permintaan agregat dengan terbatasnya penyerapan tenaga kerja. Struktur ekonomi Kabupaten Bantaeng yang masih terkonsentrasi pada sektor primer juga mencerminkan proses transformasi struktural yang belum tuntas sebagaimana dikemukakan Lewis,[21] di mana tenaga kerja idealnya bertransformasi dari sektor tradisional menuju sektor modern berproduktivitas lebih tinggi. Rendahnya kualitas modal manusia turut memperkuat kondisi ini, sesuai dengan teori human capital Becker[22] yang menegaskan bahwa pendidikan dan keterampilan menentukan produktivitas serta peluang kerja seseorang.

Perkembangan dan Karakteristik Kemiskinan

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan minimum pangan dan nonpangan.[23]

Tabel 2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantaeng Tahun 2021–2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2021	17,86	9,46
2022	17,22	9,07
2023	17,49	9,18
2024	15,80	8,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng (2024).

[19] Sukirno, "Makroekonomi: Teori Pengantar," 2016.
[20] J. M. Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money* (Macmillan, 1936).
[21] W. A. Lewis, "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour," *The Manchester School* 22, no. 2 (1954): 139–191.
[22] G. S. Becker, *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*, 3rd ed. (University of Chicago Press, 1993).
[23] Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024* (Badan Pusat Statistik, 2024).

Tabel 2 menunjukkan tingkat kemiskinan Kabupaten Bantaeng menurun dari 9,46 persen (17,86 ribu jiwa) pada 2021 menjadi 8,26 persen (15,80 ribu jiwa) pada 2024, meskipun sempat naik menjadi 9,18 persen pada 2023. Garis kemiskinan pada Maret 2024 tercatat Rp434.664 per kapita per bulan, meningkat dari Rp419.667 pada tahun sebelumnya, yang menunjukkan kenaikan kebutuhan konsumsi minimum yang harus dipenuhi masyarakat.[24]

Karakteristik kemiskinan di Kabupaten Bantaeng tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses kesejahteraan dan tingginya kerentanan ekonomi rumah tangga yang bergantung pada sektor pertanian dan pekerjaan informal dengan pendapatan tidak stabil.[25] Kondisi ini sejalan dengan teori lingkaran kemiskinan (vicious circle of poverty) Nurkse,[26] yang menjelaskan keterkaitan timbal balik antara rendahnya pendapatan, rendahnya produktivitas, dan terbatasnya investasi. Kemiskinan di Bantaeng juga selaras dengan pendekatan kapabilitas Sen,[27] yang memandang kemiskinan bukan sekadar kekurangan pendapatan, melainkan keterbatasan kemampuan individu mengakses pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak.

Temuan tersebut konsisten dengan sejumlah kajian terbaru di berbagai daerah Indonesia yang menemukan pengaruh signifikan pengangguran, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, misalnya di Sumatera Barat,[28] Jawa Barat,[29] dan secara nasional.[30] Sebagaimana ditemukan Sagala dkk.[31] di Kabupaten Pelalawan, pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran terbuka berkontribusi menekan kemiskinan, tetapi efeknya sangat bergantung pada kualitas dan produktivitas lapangan kerja yang tercipta.

Dinamika Hubungan Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan

Perbandingan Tabel 1 dan Tabel 2 memperlihatkan bahwa penurunan TPT sebesar 1,50 poin persentase (2021–2024) tidak diikuti penurunan kemiskinan dalam proporsi yang sama, yang hanya turun 1,20 poin persentase pada periode tersebut. Selain itu, kenaikan TPT pada 2023

[24] BPS Kabupaten Bantaeng, "Profil Kemiskinan Kabupaten Bantaeng Maret 2024," 2024.
[25] BPS Kabupaten Bantaeng, "Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng 2024," 2025.
[26] R. Nurkse, *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries* (Oxford University Press, 1953).
[27] A. Sen, *Development as Freedom* (Oxford University Press, 1999).
[28] Puteri dan Marwan, "Pengaruh Pengangguran, Pengeluaran per Kapita, Pendidikan...," 2023.
[29] Rahim, dkk., "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Tingkat...," 2024. Utami dan Udjianto, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan,...," 2023.
[30] Putri dan Putri, "Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka,...," 2021. Maulana dan Faqih, "Analisis Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di...," 2022.
[31] Sagala, dkk., "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran...," 2022.

(3,71 persen) tidak serta-merta membuat kemiskinan melonjak drastis, dan sebaliknya penurunan tajam TPT pada 2024 tidak membuat kemiskinan turun dalam proporsi yang sepadan. Pola ini menegaskan bahwa hubungan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng bersifat tidak linear.

Ketidaksepadanan tersebut terutama disebabkan oleh fenomena pekerja rentan (working poor), yaitu penduduk yang secara statistik telah bekerja namun tetap berada pada kondisi ekonomi rentan karena bekerja pada sektor informal dan pertanian berproduktivitas rendah, sehingga pendapatan yang diperoleh belum mampu mengangkat mereka keluar dari garis kemiskinan. Kondisi ini memperkuat argumen Todaro dan Smith[32] bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menciptakan pemerataan kesejahteraan apabila tidak diikuti perluasan kesempatan kerja yang produktif dan distribusi ekonomi yang adil. Laporan Bank Dunia juga menegaskan bahwa penurunan kemiskinan global cenderung melambat ketika perekonomian bertumpu pada sektor bernilai tambah rendah dan rentan terhadap guncangan eksternal,[33] sementara OECD[34] mencatat bahwa keterbatasan mobilitas sosial dan rendahnya akses ekonomi membuat sebagian rumah tangga sulit keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Dari sisi kesejahteraan yang lebih luas, laporan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan bahwa pembangunan manusia perlu dipahami melampaui pertumbuhan pendapatan semata,[35]sejalan dengan temuan penelitian ini bahwa kesejahteraan riil masyarakat Bantaeng lebih ditentukan oleh kualitas dan produktivitas pekerjaan dibandingkan sekadar status bekerja atau menganggur. Dengan demikian, dinamika hubungan pengangguran terbuka dan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, struktur ekonomi daerah, dan distribusi kesejahteraan, bukan semata-mata oleh jumlah penduduk yang bekerja atau tidak bekerja.

Perspektif Ekonomi Islam terhadap Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan

[32] M. P. Todaro dan S. C. Smith, *Economic Development*, 13th ed. (Pearson, 2021).

[33] World Bank, *Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course* (World Bank, 2022). World Bank, *World Development Report 2024: The Middle-Income Trap* (World Bank, 2024).

[34] Organisation for Economic Co-operation and Development, *A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility* (OECD Publishing, 2018).

[35] United Nations Development Programme, *Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene* (UNDP, 2020).

Dalam perspektif Ekonomi Islam, bekerja dipandang sebagai aktivitas produktif yang bernilai ibadah dan bagian dari tanggung jawab menjaga keberlangsungan hidup diri maupun keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah/9: 105 yang memerintahkan manusia untuk bekerja karena setiap amal akan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang-orang beriman, serta QS. Al-Jumu'ah/62: 10 yang menganjurkan umat untuk mencari karunia Allah di muka bumi setelah menunaikan ibadah. Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa pengangguran terbuka, dalam perspektif ini, mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia dalam aktivitas ekonomi produktif, bukan semata persoalan teknis ketenagakerjaan.[36] Kemiskinan dalam perspektif Ekonomi Islam juga tidak dipahami semata sebagai kekurangan pendapatan, tetapi sebagai keterbatasan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan bermartabat. QS. Al-Baqarah/2: 286 menegaskan prinsip keadilan bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar batas kesanggupannya, sedangkan QS. Quraisy/106: 3–4 mengaitkan pemenuhan kebutuhan pangan dan rasa aman sebagai bagian dari nikmat yang wajib disyukuri sekaligus diperjuangkan. Prinsip ini menjadikan pemenuhan kebutuhan dasar dan rasa aman ekonomi sebagai indikator penting kesejahteraan dalam bingkai maqasid al-syari'ah.

Hubungan antara pengangguran dan kemiskinan dalam Ekonomi Islam berkaitan erat dengan prinsip keadilan distribusi, sebagaimana ditegaskan QS. Al-Hasyr/59: 7 yang melarang harta hanya beredar di antara kelompok kaya. Prinsip ini relevan dengan temuan penelitian bahwa manfaat pembangunan ekonomi Kabupaten Bantaeng belum sepenuhnya dirasakan merata oleh masyarakat berpendapatan rendah. Konsep kesejahteraan dalam Ekonomi Islam dikenal sebagai falah, yaitu keseimbangan capaian material dan spiritual yang menjadi tujuan akhir aktivitas ekonomi,[37] sehingga penanggulangan pengangguran dan kemiskinan tidak dapat direduksi hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi juga harus menyentuh keadilan sosial dan martabat kemanusiaan.

Implikasi Konseptual: Keadilan Distribusi, Pemberdayaan Ekonomi, dan Optimalisasi Instrumen Ekonomi Islam

[36] Ismail, "Analisis Peran Pengusaha dalam Mengurangi Pengangguran...," 2021. Rahyu dan Ulhaq, "Etos Kerja dalam Pandangan Agama dan...," 2023. Syarifullah, dkk., "Konsep Etos Kerja Perspektif Ekonomi Islam," 2022.

[37] Sonita, "Eksplorasi Konsep Falah Perspektif Umer Chapra," 2022. Zein, dkk., "Falah sebagai Tujuan Akhir dalam Ekonomi...," 2024.

Pertama, penguatan keadilan distribusi ekonomi menjadi implikasi konseptual utama karena manfaat pembangunan di Kabupaten Bantaeng masih terkonsentrasi pada sektor dan wilayah tertentu. Prinsip QS. Al-Hasyr/59: 7 mengarahkan kebijakan pembangunan agar memperluas akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap kesempatan kerja, usaha produktif, pendidikan, dan sumber daya ekonomi, sehingga hasil pembangunan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.

Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi implikasi penting mengingat sebagian besar tenaga kerja Bantaeng masih terserap pada sektor pertanian berproduktivitas rendah. QS. Ar-Ra'd/13: 11 menegaskan bahwa perubahan keadaan suatu kaum berawal dari upaya kaum itu sendiri, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal—terutama pertanian bernilai tambah dan agroindustri—menjadi kunci mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, sejalan dengan teori human capital Becker[38].

Ketiga, optimalisasi instrumen Ekonomi Islam berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif memiliki relevansi tinggi untuk konteks Bantaeng. Sejumlah kajian terbaru menunjukkan bahwa zakat produktif secara signifikan meningkatkan pendapatan usaha mikro mustahik[39] dan efektif menjadi instrumen pengentasan kemiskinan apabila dikelola secara profesional dan berorientasi pemberdayaan, bukan sekadar bersifat konsumtif.[40] Wakaf produktif juga terbukti berperan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengelolaan aset produktif berbasis potensi wilayah, seperti pertanian dan peternakan,[41] sebuah model yang sangat sesuai dengan struktur ekonomi Bantaeng yang masih bertumpu pada sektor primer.

Keempat, pembangunan kesejahteraan dalam perspektif Ekonomi Islam harus diarahkan pada pencapaian falah, bukan semata pertumbuhan ekonomi agregat. QS. Al-Qashash/28: 77 mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, sehingga kebijakan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng perlu

[38] Becker, "Human Capital: A Theoretical and Empirical...," 1993.
[39] Zuchroh, "Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik...," 2022. Lestari dan Alwi, "Zakat Produktif sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan...," 2022.
[40] Andriyanto, dkk., "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan...," 2022.
[41] Hafizd, dkk., "Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif...," 2022. Rasyidi, dkk., "Pemberdayaan Wakaf Produktif terhadap Pertumbuhan Ekonomi...," 2024. Abiba dan Suprayitno, "Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Upaya...," 2023.

memadukan pertumbuhan ekonomi, keadilan distribusi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan nilai-nilai sosial keagamaan secara bersamaan agar kesejahteraan yang dicapai bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran terbuka dan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng merupakan dua fenomena sosial ekonomi yang saling berkaitan namun tidak bergerak secara linear, karena penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 4,07 persen (2021) menjadi 2,57 persen (2024) tidak diikuti penurunan kemiskinan dalam proporsi yang sepadan, yang hanya turun dari 9,46 persen menjadi 8,26 persen pada periode yang sama. Ketidaksepadanan ini terjadi karena sebagian besar tenaga kerja Bantaeng masih terserap pada sektor informal dan pertanian berproduktivitas rendah, sehingga status bekerja belum tentu membebaskan rumah tangga dari kerentanan ekonomi. Dinamika ini memperlihatkan bahwa kesejahteraan masyarakat lebih ditentukan oleh kualitas dan produktivitas pekerjaan dibandingkan sekadar penyerapan tenaga kerja secara kuantitatif.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, pengangguran terbuka dan kemiskinan dipahami bukan hanya sebagai persoalan teknis ketenagakerjaan atau kekurangan pendapatan, melainkan sebagai persoalan keadilan distribusi, pemberdayaan ekonomi umat, dan pencapaian kesejahteraan yang bersifat material sekaligus spiritual atau falah. Bekerja ditempatkan sebagai aktivitas yang bernilai ibadah, sementara kemiskinan dipandang sebagai kondisi yang harus diminimalkan melalui pemerataan hasil pembangunan, penguatan kemandirian ekonomi masyarakat, dan optimalisasi instrumen zakat, infak, sedekah, serta wakaf produktif, yang terbukti efektif meningkatkan pendapatan mustahik dan mendorong pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal apabila dikelola secara profesional.

Berdasarkan temuan tersebut, upaya penanggulangan pengangguran terbuka dan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng perlu diarahkan pada penguatan keadilan distribusi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, pengembangan sektor pertanian bernilai tambah dan agroindustri sebagai basis pemberdayaan ekonomi lokal, serta optimalisasi peran lembaga zakat dan wakaf sebagai instrumen distribusi ekonomi yang berkeadilan. Pendekatan yang memadukan kebijakan pembangunan konvensional dengan nilai-nilai Ekonomi Islam ini diyakini mampu menghasilkan kesejahteraan masyarakat Bantaeng yang lebih inklusif, berkeadilan, dan

berkelanjutan, sekaligus memperkaya diskursus akademik mengenai pembangunan daerah berbasis maqasid al-syari'ah.

REFERENSI

Abiba, R. W., & Suprayitno, E. (2023). Optimalisasi wakaf produktif dalam mendukung upaya pencapaian SDGs melalui pemberdayaan peternakan. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9(1), 109–122. https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.9073

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), 974–980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394

Andriyanto, I., Aziz, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Strategi pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, 15(1), 151–158. https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.132

Badan Pusat Statistik. (2024). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2024. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng. (2024a). Agustus 2024: Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Bantaeng sebesar 2,57 persen. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng. (2024b). Profil kemiskinan Kabupaten Bantaeng Maret 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng. (2025a). Kabupaten Bantaeng dalam angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng. (2025b). Statistik ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng. (2025c). Produk domestik regional bruto Kabupaten Bantaeng menurut lapangan usaha 2020–2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng.

Becker, G. S. (1993). Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education (3rd ed.). University of Chicago Press.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Hafizd, J. Z., Saumantri, T., & Mustopa, M. (2022). Kajian implementatif optimalisasi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan, 8(1), 85–98. https://doi.org/10.24235/jy.v8i1.8978

Ismail, I. (2021). Analisis peran pengusaha dalam mengurangi pengangguran terbuka perspektif ekonomi Islam di Kota Bima (Studi kasus HIPMI dan TDA Kota Bima). J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 4(1), 11–26.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest and money. Macmillan.

Lestari, R. S. D., & Alwi, M. A. (2022). Zakat produktif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan untuk masyarakat usia produktif. MALIA: Jurnal Ekonomi Islam, 14(1), 37–50. https://doi.org/10.35891/ml.v14i1.3679

Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. The Manchester School, 22(2), 139–191.

Maulana, A. H., & Faqih, A. (2022). Analisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. Transformasi: Journal of Economics and Business Management, 1(4), 118–125. https://doi.org/10.56444/transformasi.v1i4.267

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Nurkse, R. (1953). Problems of capital formation in underdeveloped countries. Oxford University Press.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). A broken social elevator? How to promote social mobility. OECD Publishing.

Putri, E. M., & Putri, D. Z. (2021). Pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia. Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, 10(2), 106–114. https://doi.org/10.24036/ecosains.11564057.00

Puteri, R. M., & Marwan, M. (2023). Pengaruh pengangguran, pengeluaran per kapita, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Arzusin, 3(3), 321–340. https://doi.org/10.58578/arzusin.v3i3.1134

Rahim, A., Haryadi, W., & Muliawansyah, D. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan laju pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016–2020. Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis, 3(1), 15–24. https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1886

Rahyu, P., & Ulhaq, M. Z. (2023). Etos kerja dalam pandangan agama dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi Islam. J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 6(2), 79–88. https://doi.org/10.52266/jesa.v6i2.2317

Rasyidi, K., Misbahuddin, & Ridwan, S. (2024). Pemberdayaan wakaf produktif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Maros. Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 16(1), 23–40. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i1.1288

Sagala, R. S., Harlen, & Utami, B. C. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap kemiskinan di Kabupaten Pelalawan. Jurnal Niara, 15(3), 434–443. https://doi.org/10.31849/niara.v15i3.10428

Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.

Sonita, E. (2022). Eksplorasi konsep falah perspektif Umer Chapra. MAMEN: Jurnal Manajemen, 1(1), 69–78. https://doi.org/10.55123/mamen.v1i1.25

Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.

Sukirno, S. (2016). Makroekonomi: Teori pengantar (Edisi revisi). Rajawali Pers.

Syarifullah, Hannani, & Nurhayati, S. (2022). Konsep etos kerja perspektif ekonomi Islam. Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 9–18. https://doi.org/10.35905/rikaz.v1i1.3425

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). Economic development (13th ed.). Pearson.

United Nations Development Programme. (2020). Human development report 2020: The next frontier: Human development and the Anthropocene. UNDP.

Utami, D. D., & Udjianto, D. W. (2023). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan. Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian, 2(7), 637–646. https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1441

World Bank. (2022). Poverty and shared prosperity 2022: Correcting course. World Bank.

World Bank. (2024). World development report 2024: The middle-income trap. World Bank.

Zein, A. W., Anggraini, D., Harahap, H. I. Y., & Sabrina, T. W. (2024). Falah sebagai tujuan akhir dalam ekonomi Islam: Perspektif kesejahteraan dunia dan akhirat. JIS: Journal Islamic Studies, 2(3), 132–142.

Zuchroh, I. (2022). Zakat produktif: Kebijakan pengelolaan keuangan publik sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3067–3073. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387